

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada awal tahun anggaran 2019 ini, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018 lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lingkup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk **"TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"**

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 7 Januari 2018

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741004 199402 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	4
4. Kondisi SDM Aparatur	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	7
A. Visi dan Misi	7
B. Strategi dan Arah Kebijakan	8
C. Prioritas Daerah	10
BAB III PENGELOLAAN BELANJA	11
A. Kebijakan Keuangan Unit OPD	11
B. Permasalahan dan Solusi	13
1. Permasalahan	13
2. Solusi	13
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
 DAERAH	15
A. Program dan Kegiatan	15
1. Rencana	15
2. Realisasi	15
B. Target dan Realisasi Belanja	22
1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input	22
2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output	24
3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome	45
4. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program	48
C. Permasalahan dan Solusi	49
1. Permasalahan	49
2. Solusi	49
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN YANG	
 DITERIMA	50
A. Dasar Hukum	50
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	50
C. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ...	50
D. Permasalahan dan Solusi	52

BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	53
	A. Pembinaan Batas Wilayah	53
BAB VII	PENUTUP	54